

Implementasi Program Intensifikasi Pertanian Melalui Pemilihan dan Penggunaan Bibit Unggul dalam Meningkatkan Kemandirian Pangan di Kecamatan Kasemen Kota Serang

Hafizd Nurdiansyah¹, Nurul Syahira Arinda², Febry Amelia Koesnadi³, Novita Paulina Banjarnahor^{4*}

^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

e-mail: *hafizd.nurdiansyah04@gmail.com

Abstrac/Abstrak

This study aims to analyze the implementation of agricultural intensification policies through the selection and use of superior seeds to improve food self-sufficiency in Kasemen District, Serang City. Kasemen District was selected as the research site because it is the largest food production center in Serang City, yet it still faces various challenges. This study employed a descriptive method with a qualitative approach, using interviews, observations, and documentation studies as data collection techniques. The policy implementation was analyzed using the 5C model, which consists of content, context, commitment, capacity, and clients and coalitions. The results show that the implementation of the agricultural intensification program has been carried out in accordance with the direction of local government policies, and the use of superior seeds has contributed to increasing agricultural productivity. Government support has also been provided through agricultural extension services, assistance, and the provision of agricultural facilities. However, the implementation of the program has not yet been optimal due to several obstacles, including the failure to achieve the IP300 target, the high incidence of pest and disease attacks, particularly rice stem borer infestations, the limited number of agricultural extension officers in Kasemen District, and delays in the distribution of seeds to farmer groups during the planting season. Nevertheless, the high level of participation among farmer groups and the support of various stakeholders indicate that the program has contributed to increasing agricultural productivity and supporting food self-sufficiency in Kasemen District. Therefore, strengthening human resource capacity, improving pest control measures, ensuring the timely distribution of seeds in accordance with farmers' planting schedules, and enhancing coordination and collaboration among stakeholders are necessary to optimize the success of the program.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan intensifikasi pertanian melalui pemilihan dan penggunaan bibit unggul dalam meningkatkan kemandirian pangan di Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Kecamatan Kasemen dipilih sebagai lokus penelitian karena merupakan sentra produksi pangan terbesar di Kota Serang, namun masih menghadapi berbagai permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Serta melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dalam analisis implementasi kebijakan menggunakan model 5C yang meliputi *content*, *context*, *commitment*, *capacity*, serta *clients and coalitions*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program intensifikasi pertanian telah berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah daerah dan penggunaan bibit unggul terbukti membantu meningkatkan produktivitas pertanian. Dukungan pemerintah juga diwujudkan melalui penyuluhan, pendampingan, dan penyediaan sarana pertanian. Namun, implementasi program belum berjalan optimal karena masih terdapat hambatan berupa belum tercapainya target IP300, tingginya serangan OPT terutama Penggerek Batang Padi, keterbatasan sumber daya penyuluh di Kecamatan Kasemen, serta keterlambatan distribusi benih kepada kelompok tani ketika musim tanam. Meskipun demikian, tingginya partisipasi kelompok tani dan dukungan berbagai pihak menunjukkan bahwa program ini mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan kemandirian pangan di Kecamatan Kasemen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengendalian hama yang lebih efektif, distribusi benih dan bibit yang sesuai dengan jadwal tanam petani, serta peningkatan koordinasi dan kolaborasi antaraktor untuk mengoptimalkan keberhasilan program.

Keywords:

*Agricultural
Intensification;
Superior Seeds;
Food Self-
Sufficiency;
Kasemen District.*

Intensifikasi
Pertanian;
Bibit Unggul;
Kemandirian
Pangan;
Kecamatan
Kasemen.

DOI:

<https://doi.org/10.53611/dp43tb85>

Article Info

Received: July 07, 2026

Accepted: August 16, 2026

Published: September 15, 2026

Copyright © 2026 The Author(s). Published by Suwaib Amiruddin Foundation, Indonesia.

This is an Open Access article under the CC BY 4.0 license

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia di tengah pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan ketidakstabilan global. Indonesia sebagai negara agraris memiliki langkah strategis untuk dapat menciptakan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Ketahanan pangan telah menjadi agenda prioritas nasional yang telah tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2025).

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang pada Pasal 15 ayat (1) berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan pangan”, yang kemudian pada Pasal 5 menjelaskan terkait perwujudan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan yaitu dengan:

- a. Mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
- b. Mengembangkan efisiensi sistem tata usaha Pangan;
- c. Mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
- d. Membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
- e. Mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan

- f. Membangun kawasan sentra Produksi Pangan.

Kebijakan pangan telah diarahkan untuk mencapai kedaulatan pangan, peningkatan produksi dalam negeri, penguatan infrastruktur, dan modernisasi sektor agribisnis. Untuk menekan ketergantungan pangan dan menghadapi ketidakpastian pasar global dengan memanfaatkan teknologi pertanian modern serta pengembangan riset dan inovasi varietas tanaman unggul. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan benih unggul sebagai sarana produksi paling penting dalam kegiatan agribisnis karena menjadi kunci dalam menentukan kualitas dan produktivitas hasil pertanian KASAI (2025). Penggunaan benih yang unggul dan berkualitas dapat meningkatkan produktivitas pertanian (Akbar et al., 2023).

Sejalan dengan kondisi tersebut, dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjelaskan bahwa intensifikasi kawasan pertanian dilakukan melalui berbagai langkah strategis guna mendukung peningkatan produksi dan keberlanjutan pertanian. Kondisi pangan di Kota Serang juga dapat dilihat melalui pola konsumsi pangan masyarakat, khususnya pada kelompok padi-padian yang terdiri dari beras, jagung, dan terigu sebagai sumber pangan pokok. Kelompok padi-padian menjadi jenis pangan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Kota Serang sehingga dapat menunjukkan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap padi-padian.

Tabel 1. Produksi Pertanian menurut Kecamatan Kota Serang

Kecamatan	Luas Lahan Baku Sawah	Produksi Pertanian		
		2023	2024	2025
Curug	734	8,039	8,642	8,840
Walantaka	1,333	13,779	16,553	18,160
Cipocok Jaya	582	7,682	6,765	5,667
Serang	268	2,807	3,282	2,906
Taktakan	455	2,440	3,921	6,217
Kasemen	3,983	45,801	47,482	45,431
Jumlah	7,355	80,547	86,644	87,220

Sumber: Data diolah dari Dinas Pertanian Kota Serang, 2026

Kecamatan Kasemen menjadi salah satu wilayah yang menjadi bagian

penting dalam produksi padi nasional melalui berbagai program pertanian seperti Gerakan Tanam. Produksi pertanian di Kecamatan Kasemen menjadi yang paling tinggi di Kota Serang sebesar 45,431 ton pada tahun 2025 dengan luas lahan baku sawah seluas 3.893 Ha atau sekitar 54 persen dari total lahan pertanian di Kota Serang.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan dalam pertanian di Kecamatan Kasemen, seperti belum tercapainya target Indeks Pertanaman 300 (IP3) yang menjadi salah satu tujuan program Intensifikasi Pertanian di Kecamatan Kasemen. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Lahan dengan IP200

Jenis lahan	Luas Lahan	Indeks Pertanaman
Lahan Sawah Irigasi	3.633 Ha	IP 200
Lahan Tadah Hujan	601 Ha	

Sumber: Data diolah Peneliti dari DKP3 Kota Serang, 2026

Berdasarkan data tersebut, tidak ada satu pun lahan yang tercatat melakukan tanam lebih dari dua kali dalam setahun selama tiga tahun berturut-turut, yang berarti target IP300 belum pernah tercapai sama sekali di wilayah ini. Menurut Kardiyono et al. (2021) program Intensifikasi Pertanian menjadi upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim dan keterbatasan lahan.

Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu masih tingginya serangan hama endemik yaitu penggerek batang padi dan wereng batang cokelat (WBC) yang menjadi hama paling sering menyerang tanaman padi milik petani, akibatnya adalah dapat menghambat peningkatan produktivitas pertanian di Kecamatan Kasemen. Seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Luas Lahan Terkena OPT

Jenis OPT	Luas Lahan Terkena Berdasarkan Tahun		
	2023	2024	2025
Penggerek Batang Padi	100 Ha	-	594 Ha
Wereng Batang Cokelat	-	381 Ha	430 Ha
Bakteri Hawar Daun	-	-	10 Ha

Sumber: Data diolah Peneliti dari DKP3 Kota Serang, 2026

Serangan Penggerek Batang Padi (PBP) melonjak dari 100 Ha pada 2023 menjadi 594 Ha pada 2025, sementara serangan Wereng Batang Cokelat (WBC) meningkat dari 381 Ha pada 2024 menjadi 430 Ha pada 2025 tanpa disertai pengendalian sama sekali. Bahkan pada tahun 2025, jenis OPT baru yaitu Bakteri Hawar Daun (BLB) mulai muncul seluas 10 Ha tanpa ada respons pengendalian yang dilakukan, yang menandakan bahwa sistem pengawasan

hama di wilayah ini belum beroperasi secara proaktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa produktivitas pertanian daerah belum sepenuhnya stabil dan optimal dikarenakan banyak faktor yang dapat memengaruhinya seperti perubahan iklim dan serangan OPT (Damayanti et al., 2025).
Serta masih terbatasnya sumber daya penyuluh dalam memberikan pendampingan serta penyuluhan kepada kelompok tani di Kecamatan Kasemen.

Tabel 4. Jumlah Kelompok Tani dan Penyuluh di Kecamatan Kasemen

Jumlah Penyuluh	Jumlah Kelurahan	Jumlah Kelompok Tani
7 Orang	10 Kelurahan	120 Kelompok Tani Aktif

Sumber: Data diolah Peneliti dari SIMLUHTAN dan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kasemen, 2026

Di Kecamatan Kasemen terdapat 120 kelompok tani aktif yang tersebar di 10 kelurahan dengan sebagian besar berstatus aktif, sementara jumlah penyuluh yang tersedia hanya 7 orang. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah kelompok tani yang harus didampingi dengan jumlah penyuluh yang tersedia. Jika dihitung secara rata-rata, satu penyuluh harus membina sekitar 17 kelompok tani sekaligus. Beban kerja yang cukup besar tersebut berpotensi menyebabkan pendampingan, penyuluhan, serta pengawasan terhadap petani tidak dapat dilakukan secara maksimal dan merata.
Beberapa penelitian terdahulu umumnya mengkaji intensifikasi pertanian secara terpisah dari sisi teknis agronomis maupun kelembagaan. Penelitian ini secara khusus menganalisis implementasi kebijakan intensifikasi pertanian dengan menjadikan Kecamatan Kasemen sebagai lokus yang memiliki perpaduan unik antara potensi lahan terbesar, tekanan hama tertinggi, dan keterbatasan kapasitas pendampingan sehingga hasil

penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh dan rekomendasi yang lebih kontekstual bagi penguatan kemandirian pangan daerah
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program intensifikasi pertanian melalui pemilihan dan penggunaan bibit unggul dalam meningkatkan kemandirian pangan di Kecamatan Kasemen, Kota Serang.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi, dokumentasi, wawancara mendalam, serta studi literatur dalam proses pengumpulan data. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran secara mendalam terkait program Intensifikasi Pertanian melalui pemilihan bibit unggul di Kecamatan Kasemen.
Metode kualitatif sering juga disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah

(*natural setting*) atau juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan pada bidang antropologi budaya dan disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya berupa kualitatif (Sugiyono, 2022:8). Kemudian untuk dapat menjaga keabsahan data yang diperoleh selama penelitian, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber serta *membercheck*.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* untuk mendapatkan data yang mencerminkan realitas subjek penelitian. Metode ini melibatkan pemilihan individu berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah model Miles, Huberman, dan Saldana yang menekankan bahwa aktivitas analisis dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif dan terus-menerus sampai proses selesai secara keseluruhan. (Miles et al., 2014).

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah sekumpulan informasi yang memberikan peluang kepada peneliti untuk menyimpulkan dan mengambil tindakan. Penyajian data adalah sebuah penjelasan informasi dalam bentuk deskripsi dan narasi yang komprehensif, yang disusun berdasarkan poin-poin temuan yang ada dalam reduksi data, dan disampaikan dengan bahasa peneliti secara logis dan sistematis, sehingga lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, seluruh data yang diperoleh di lapangan, baik berupa hasil wawancara, observasi maupun analisis, dapat menghasilkan sebuah deskripsi.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang berfungsi untuk menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan, menghilangkan informasi yang tidak diperlukan, serta mengorganisir data dengan cara yang

terstruktur. Dengan langkah-langkah ini, kesimpulan dapat diambil. Proses ini melibatkan merangkum, mengikhtisarkan, atau menyeleksi data yang diperoleh dari catatan lapangan, kemudian mengelompokkannya ke dalam kategori tema yang relevan dengan fokus penelitian dan permasalahan yang ingin diteliti.

3. Penyajian Data

Proses ini adalah penyajian data ke dalam sejumlah matriks yang sesuai, berfungsi untuk memetakan data yang telah direduksi. Hal ini juga memudahkan dalam konstruk, sehingga kita dapat menuturkan, menyimpulkan, dan menginterpretasikan data dengan lebih jelas.

4. Penarikan Kesimpulan

Membuat kesimpulan sementara adalah bekal dalam melakukan penelitian. Kesimpulan ini berfungsi untuk memberikan penafsiran atas data yang diperoleh, terutama yang berkaitan dengan fokus penelitian. Proses penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan dengan pendekatan yang fleksibel, tetap terbuka, tetapi semakin detail seiring dengan bertambahnya kumpulan data yang telah dikumpulkan di lapangan dan semakin terintegrasi. Data yang diperoleh disusun dengan baik, kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Penelitian mengenai intensifikasi pertanian melalui pemilihan bibit unggul di Kecamatan Kasemen Kota Serang menggunakan model *hybrid* implementasi kebijakan 5C sebagai dimensi konseptual penelitian. Dimensi *Content* (isi kebijakan) mengkaji kejelasan tujuan program, kesesuaian bibit unggul dengan kebutuhan petani, serta kejelasan pedoman pelaksanaan program. Dimensi *Context* (konteks implementasi) menelaah pengaruh kondisi sosial ekonomi petani, dukungan kelembagaan seperti Dinas Pertanian dan kelompok tani, serta kesesuaian kondisi geografis dan lahan pertanian terhadap pelaksanaan program. Dimensi *Commitment* (komitmen) berfokus pada

kesungguhan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan kelompok tani dalam mendukung serta melaksanakan program penggunaan bibit unggul. Dimensi *Capacity* (kapasitas) menilai ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta sarana dan prasarana pertanian yang menunjang keberhasilan program. Sementara itu, dimensi *Clients and Coalitions* (kelompok sasaran dan koalisi) mengkaji tingkat partisipasi petani sebagai penerima manfaat program, peran kelompok tani dalam mendukung adopsi bibit unggul, serta kerja sama berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan intensifikasi pertanian di Kecamatan Kasemen Kota Serang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Content

Penerapan program Intensifikasi Pertanian di Kecamatan Kasemen selain untuk meningkatkan produktivitas pertanian, juga ditujukan untuk dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) yang sebelumnya di Kecamatan Kasemen rata-rata tanam hanya dua kali menjadi tiga kali dalam satu tahun setiap musim tanam. Selain itu juga dengan adanya program Intensifikasi Pertanian, para petani didorong untuk memperkuat kemandirian pangan petani dengan mengurangi ketergantungan akan benih dan bibit dari bantuan pemerintah dengan cara melakukan pengembangan swadaya kelompok tani. Demikian, target untuk dapat mencapai IP3 belum dapat tercapai dikarenakan umur rata-rata siap panen adalah empat bulan, sehingga petani di Kecamatan Kasemen masih berada dalam pola tanam dua kali dalam setahun.

Dalam hal ini juga terdapat sebuah paradoks antara tujuan peningkatan produktivitas melalui bantuan subsidi dengan kemandirian petani, di mana dengan hanya bergantung pada bantuan akan menghambat tumbuhnya kemandirian petani. Penyaluran benih

dan bibit unggul dilakukan dengan mekanisme CPCL (Calon Petani Calon Lokasi) melalui pendampingan penyuluh yaitu BPP Kecamatan Kasemen dari awal hingga panen. Dengan penggunaan benih seperti Inpari32, terbukti mampu meningkatkan produktivitas pertanian.

Tabel 5. Bantuan Pupuk Subsidi Tahun 2026

Kecamatan	Luas Lahan	Jumlah Benih
Walantaka	109 ha	2.725 ton
Cipocok Jaya	488 ha	12.200 ton
Kasemen	1.983 ha	49,574 ton

Sumber: Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten, 2026

Namun peningkatan hasil panen tidak semata-mata dilihat pada jenis benih ataupun bibit yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas budidaya, ketersediaan air, modal petani, dan pengendalian hama yang benar.

Gambar 1. Irigasi Primer di Kecamatan Kasemen



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Tujuan dari penerapan program Intensifikasi Pertanian di Kecamatan, diharapkan mampu untuk dapat berpengaruh positif, baik untuk meningkatkan produktivitas panen, meningkatkan IP2 menjadi IP3, maupun pendapatan dari petani di Kecamatan Kasemen. Hal ini juga sejalan dengan penelitian dari Murtiningsih (2021) bahwa lahan pertanian yang dapat mencapai IP3 mampu untuk meningkatkan pendapatan petani. Dengan juga dukungan modal, luas lahan, dan pendapatan akan menjadikan IP3 menjadi sebuah hal berkelanjutan

bagi sistem pertanian di Kecamatan Kasemen. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sukardi et al. (2026) bahwa program Intensifikasi Pertanian tidak dapat berjalan secara optimal jika tidak adanya dukungan struktural di tingkat pelaksanaan.

Aspek Context

Lingkungan sosial-ekonomi dan politik merupakan faktor yang secara langsung memengaruhi implementasi program intensifikasi pertanian di Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Sebagian besar petani di wilayah ini berstatus sebagai petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri, sehingga pendapatan mereka sangat terbatas karena hasil panen harus dibagi dengan pemilik lahan. Biaya produksi budi daya di Kecamatan Kasemen berkisar antara Rp10 juta hingga Rp15 juta per hektare tergantung dengan intensitas pengendalian hama, sehingga keterbatasan modal menjadi hambatan struktural yang berulang, termasuk dalam mengakses skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui BRI akibat riwayat kredit yang bermasalah seperti tunggakan pinjaman daring (pinjol) atau layanan pembayaran digital yang tidak lancar.

“Banyak petani di Kasemen itu petani penggarap, dibiayai bosnya dari olah lahan sampai pasca panen, jadi mereka nggak punya bargaining posisi apalagi soal keputusan tanam. Modal produksi minimal Rp12 juta per hektare, itu berat buat yang nggak punya modal sendiri. Makanya pemerintah bantu lewat pupuk subsidi, benih, alsintan, sampai asuransi AUTP.”

Kondisi tersebut tidak hanya menggambarkan latar sosial-ekonomi secara deskriptif, melainkan sebagai faktor determinan yang membentuk ruang gerak bagi petani dalam mengambil keputusan budi daya, sekaligus membatasi efektivitas kebijakan berbasis bantuan produksi.

Hasil yang serupa juga ditemukan dalam penelitian Huanza et al., (2022), di mana kondisi sosial ekonomi petani di lahan pasang surut Sumatera Selatan juga turut memengaruhi kemampuan mereka dalam implementasi program intensifikasi secara optimal. Sementara itu, Rusdin et al., (2025) dalam penelitiannya juga menegaskan bahwa kondisi sosial-ekonomi dan tekanan inventasi eksternal menjadi faktor kontekstual yang memperlemah implementasi kebijakan pertanian di lapangan.

Struktur kelembagaan yang terlibat dalam program intensifikasi pertanian di Kecamatan Kasemen, mulai dari Kementerian Pertanian di tingkat pusat, Dinas Pertanian di tingkat kota, hingga Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan. Struktur ini berdampak pada keterlambatan penyaluran bantuan benih, di mana benih seringkali tiba tidak sesuai dengan jadwal tanam petani yang telah lebih dulu mengolah lahan. Perubahan status penyuluh menjadi pegawai pusat sejak Januari 2026 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2024 juga menambah kompleksitas koordinasi antara BPP dan Dinas Pertanian Kota Serang melalui keterlibatan BRMP sebagai lembaga penghubung.

“Sejak Januari 2026 semua penyuluh sudah jadi pegawai pusat, sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2024. Suratnya dari Kementerian turun ke BRMP provinsi dulu, baru disebar ke kabupaten/kota. Alurnya memang panjang, jadi kadang benihnya baru sampai ke kelompok tani pas musim tanam sudah lewat.”

Panjangnya alur birokrasi tersebut memperlihatkan bahwa struktur institusi bukan hanya sekadar kerangka administratif, melainkan variabel *context* yang secara langsung menentukan ketepatan waktu dalam implementasi kebijakan di lapangan. Kondisi tersebut sebanding dengan temuan penelitian Rusdin et al., (2025) yang menyatakan

bahawa minimnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, investor, dan masyarakat merupakan faktor penghambat utama implementasi kebijakan LP2B di Merauke. Huanza et al., (2022) pun menemukan bahwa keberhasilan program intensifikasi sangat ditentukan oleh kekuatan dukungan kelembagaan dan sinergi antarinstansi, khususnya dalam konteks lahan suboptimal yang memerlukan intervensi teknis terpadu.

Budaya lokal petani di Kecamatan Kasemen juga tidak dapat diabaikan dalam proses adopsi teknologi pertanian dan inovasi varietas unggul. Terdapat kepercayaan tradisional di kalangan petani bahwa penanaman pada bulan-bulan tertentu, seperti bulan lima, dipercaya akan menghasilkan panen yang buruk, meskipun kepercayaan ini mulai terkikis seiring modernisasi pertanian.

“Kalau di sini sebenarnya ada, bulan empat-lima itu katanya nggak boleh tanam karena cuacanya ekstrem, panas, jadi tanahnya asam-asaman. Tapi sekarang mah udah beda, ada obat-obatan kayak asam amino, bakterisida, jadi petani tanam aja di mana ada air.”

Selain itu, petani juga cenderung tidak bersedia mengadopsi varietas baru sebelum melihat bukti hasil secara langsung melalui percontohan di lahan terbatas, sehingga pendekatan DEMFARM terbukti lebih efektif dibandingkan sosialisasi konvensional.

“Kita memasukkan Inpari 32 itu harus melalui DEMFARM dulu sebagai percontohan. Petani harus lihat dulu, oh ternyata hasilnya bagus, baru nanti mau nyoba. Jadi, butuh proses pembuktian terlebih dahulu kepada petani”

Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya lokal menjadi penyaring (filter) dalam menentukan kecepatan penerimaan inovasi kebijakan, bukan sekadar latar belakang yang statis. Kecenderungan serupa ditemukan oleh

Rusdin et al., (2025), yang menyatakan bahwa ketidaksesuaian pendekatan kebijakan formal dengan praktik dan nilai-nilai budaya lokal masyarakat adat di Merauke memicu resistensi dan penyesuaian yang lambat terhadap program. Dalam penelitian Huanza et al., (2022), aspek sosial juga terbukti memengaruhi dampak intensifikasi, di mana program-program yang kurang mempertimbangkan konteks sosial budaya petani cenderung menghasilkan dampak yang tidak optimal terhadap alokasi waktu kerja dan kesejahteraan rumah tangga tani.

Kekuatan politik dalam implementasi program intensifikasi pertanian di Kecamatan Kasemen tercermin dalam berbagai bentuk, mulai dari kebijakan alokasi anggaran hingga mekanisme penyaluran bantuan yang sering mengalami pemotongan anggaran. Posisi Wali Kota Serang dalam memperbarui Surat Keputusan kelompok tani setiap tahun mencerminkan bagaimana kekuatan politik daerah turut menentukan akses kelompok tani terhadap program pemerintah.

“Anggaran yang katanya Rp12 juta per hektare itu sampai ke kita paling 40 persen aja, udah dipotong-potong di setiap jenjang. Kalau dibandingkan sama program Bank Indonesia di kluster hortikultura, itu bisa sampai 95 persen sampai ke kelompok, karena jalurnya lebih langsung.”

Kesenjangan antara alokasi anggaran yang direncanakan dengan realisasi yang diterima petani menunjukkan bahwa kekuatan politik, dalam kerangka Model 5C, tidak hanya menyangkut dukungan formal terhadap kebijakan, tetapi juga integritas mekanisme penyaluran sumber daya di sepanjang rantai birokrasi. Hal ini sejalan dengan temuan Rusdin et al., (2025) yang menemukan bahwa konflik kepentingan antara kebutuhan pembangunan ekonomi jangka pendek dan perlindungan lahan pertanian jangka

panjang sering melemahkan integritas kebijakan di tingkat lapangan. Sementara itu, Huanza et al., (2022) menemukan bahwa program UPSUS Pajale yang paling minim dukungan politik dan kelembagaan menghasilkan produktivitas terendah, yakni hanya Rp0,56 juta per periode per tahun, mengindikasikan bahwa kekuatan politik dan komitmen anggaran merupakan variabel penentu dalam efektivitas program intensifikasi.

Secara keseluruhan, konteks implementasi program intensifikasi pertanian di Kecamatan Kasemen menunjukkan adanya kesenjangan yang konsisten antara perencanaan kebijakan dan kondisi riil di lapangan. Sebagaimana juga ditemukan dalam dua penelitian terdahulu yang dijadikan pembandingan. Ketiga studi ini secara bersamaan menegaskan bahwa keberhasilan program intensifikasi tidak semata-mata ditentukan oleh substansi kebijakan atau ketersediaan teknologi, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kesesuaian konteks sosial, ekonomi, budaya, dan politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan. Rusdin et al., (2025) menekankan perlunya pendekatan implementasi yang lebih adaptif dan berbasis data lokal, khususnya di wilayah dengan tekanan konversi lahan yang tinggi dan karakteristik sosial-ekologis yang kompleks. Penelitian Huanza et al., (2022) menegaskan bahwa meskipun intensifikasi terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan produktivitas petani secara ekonomi, dampak negatifnya terhadap alokasi waktu kerja dan pengangguran menunjukkan bahwa konteks sosial harus menjadi bagian dari evaluasi kebijakan secara komprehensif. Oleh karena itu, pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan seluruh dimensi lingkungan menjadi syarat mutlak agar program intensifikasi pertanian di Kecamatan Kasemen dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Aspek *Commitment*

Implementasi kebijakan intensifikasi pertanian di Kecamatan Kasemen menunjukkan adanya kesungguhan para pelaksana kebijakan dalam mendorong tercapainya tujuan peningkatan produktivitas pertanian. Komitmen tersebut dapat dilihat melalui keterlibatan berbagai aktor pelaksana, mulai dari Kementerian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Serang, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), hingga kelompok tani sebagai penerima sekaligus pelaksana utama program di lapangan. Kementerian Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Serang berupaya menjaga keberlangsungan program melalui pengawasan kegiatan budidaya, penyediaan bantuan benih dan akses pupuk bersubsidi, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pelaksanaan kegiatan kolektif seperti GERDEL (Gerakan Pengendalian) dan GERNANG (Gerakan Penanganan). Pemerintah juga terus melakukan percepatan waktu tanam untuk mendorong pencapaian target Indeks Pertanaman (IP300). Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa target tersebut hingga saat ini belum tercapai karena sebagian besar petani masih menerapkan pola tanam dua kali dalam setahun (IP2).

Pemerintah terus berupaya mempertahankan pelaksanaan program intensifikasi pertanian melalui penyediaan bantuan benih, alsintan, serta evaluasi pada setiap musim tanam.

“Ada pelaporan tanam, panen, dan produktivitas setiap musim. Dari pemerintah, bantuan benih terus ada secara berulang, termasuk alsintan (alat dan mesin pertanian) baik pra panen maupun saat panen.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tetap mempertahankan pelaksanaan program melalui pendampingan, evaluasi, serta penyediaan sarana produksi meskipun

target kebijakan belum tercapai. Sementara itu, penyuluh pertanian juga menunjukkan komitmennya melalui pendampingan teknis kepada petani dan penguatan adopsi inovasi pertanian dengan memanfaatkan petani pionir sebagai pelopor inovasi. Pada tingkat kelompok tani, komitmen terlihat dari upaya petani untuk terus meningkatkan kualitas usaha taninya melalui pengujian bibit, pengamatan kondisi tanaman secara berkala, hingga pencarian informasi varietas baru secara mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan program, tetapi juga pada kesungguhan para pelaksana dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.

Komitmen tersebut juga terlihat dalam upaya pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan, yaitu meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas padi melalui berbagai program intensifikasi. Meskipun target peningkatan produktivitas hingga 10–12 ton per hektare dan penerapan IP300 masih menghadapi berbagai kendala teknis, pemerintah tetap berupaya mempertahankan pelaksanaan program melalui pendampingan, bantuan benih, pupuk bersubsidi, serta penguatan kapasitas petani.

“Pemerintah bersifat sebagai fasilitator dengan memberikan stimulus, bukan menanggung seluruh biaya. Bentuk bantuan yang diberikan antara lain bantuan benih melalui program CPCL, kemudahan mendapatkan pupuk bersubsidi melalui RDKK yang dibantu penyuluh, buffer stock pestisida yang bisa diajukan saat serangan hama, peminjaman alat mesin pertanian (alsin) melalui Brigade Alsin yang ada di Kasemen dan Provinsi, serta asuransi usaha tani padi (AUTP) sebanyak 200 hektar gratis dari Dinas Pertanian Provinsi Banten. Penyuluh juga mendorong petani untuk

merevolving hasil panen, yaitu menyisihkan sebagian hasil untuk modal tanam berikutnya, agar tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah.”

Komitmen pemerintah tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan bantuan, tetapi juga melalui upaya membangun kemandirian petani agar mampu membiayai usaha taninya. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara target yang ditetapkan dengan kondisi aktual di lapangan. Keterbatasan jumlah bantuan benih, keterbatasan waktu jeda antarmusim tanam, serta belum optimalnya mekanisme *revolving* benih menunjukkan bahwa komitmen terhadap pencapaian tujuan kebijakan belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai. Sejalan dengan model implementasi kebijakan 5C, dimensi *commitment* menekankan kesungguhan aktor pelaksana dalam mempertahankan implementasi kebijakan meskipun menghadapi berbagai hambatan. Dalam penelitian ini, komitmen tersebut tercermin dari konsistensi pemerintah, penyuluh, dan kelompok tani dalam menjalankan program intensifikasi pertanian meskipun target IP300 belum tercapai.

Komitmen implementasi kebijakan juga terlihat dari keyakinan pemerintah bahwa penyediaan sarana produksi dan dukungan teknologi dapat meningkatkan produktivitas pertanian serta mendorong kemandirian petani. Berbagai bentuk bantuan seperti benih unggul, pestisida, asuransi usaha tani, dan alat mesin pertanian diberikan sebagai instrumen utama untuk mencapai perubahan yang diharapkan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan perilaku petani tidak terjadi secara otomatis hanya karena adanya bantuan. Adopsi inovasi lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman dan tingkat kepercayaan petani terhadap manfaat teknologi yang diperkenalkan. Keberhasilan pelaksanaan DEMFARM varietas Inpari 32 menunjukkan bahwa

Ketua Kelompok Tani Sumberjaya menyatakan bahwa informasi program biasanya diterima melalui telepon langsung dari BPP atau penyuluh lapangan tanpa harus mengajukan permintaan terlebih dahulu. Hal serupa disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Harja Mukti 1 yang menyatakan bahwa pemerintah yang aktif datang memberikan kabar, sehingga dirinya tidak perlu membuat proposal pengajuan. Meskipun demikian, terdapat kendala pada ketepatan waktu distribusi. Penyuluh BPP mengungkapkan bahwa bantuan benih sering datang terlambat dan tidak sesuai jadwal tanam petani. Contohnya, petani sudah mulai menanam di bulan Maret sementara benih baru datang di bulan Mei. Kondisi ini juga dikeluhkan Ketua Kelompok Tani Sumberjaya yang menegaskan bahwa bibit harus sudah tersedia saat lahan siap diolah, bukan sebaliknya, sehingga akibat keterlambatan tersebut petani terpaksa menggunakan benih sendiri dan tujuan program tidak tercapai secara optimal. Selain itu, adanya tumpang tindih program dari dinas provinsi dan dinas kota yang menawarkan bantuan dalam waktu bersamaan juga menjadi kendala tersendiri di tingkat kelompok tani

Kondisi serupa ditemukan oleh Ahmadi & Rahaju (2018) dalam penelitiannya di GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti, yang menemukan bahwa waktu penyaluran pupuk dan benih bersubsidi tidak berjalan sesuai jadwal karena terkendala perbedaan jam kerja antar petani, sehingga mekanisme RDKK yang telah disusun pun tidak dapat dijalankan secara konsisten. Dari sisi kapasitas finansial, keterbatasan anggaran APBD Kota Serang yang hanya mampu menjangkau sekitar 100 hektare per kecamatan menjadi kendala serius, mengingat luas lahan pertanian Kecamatan Kasemen mencapai hampir 3.983 hektare yang jauh melampaui kapasitas bantuan yang tersedia. Adanya pemotongan anggaran berlapis di setiap jenjang birokrasi yang menyebabkan

petani hanya menerima sekitar 40 persen dari alokasi awal turut memperburuk kondisi kapasitas finansial program ini secara keseluruhan.

Kapasitas sumber daya manusia dalam program intensifikasi pertanian di Kecamatan Kasemen menunjukkan kondisi yang timpang antara ketersediaan dan kebutuhan lapangan, di mana tujuh orang penyuluh harus melayani 120 kelompok tani yang tersebar di sepuluh kelurahan. Kondisi ini menyebabkan intensitas pendampingan tidak merata, di mana kelompok tani yang sedang menjalankan program akan lebih sering mendapat kunjungan, sementara kelompok tani lain bisa tidak dikunjungi selama sebulan penuh. Dari perspektif petani di Kecamatan Kasemen, penyuluhan yang diberikan dinilai masih terlalu teoritis dan kurang dapat langsung diterapkan di lapangan, sehingga petani yang telah berpengalaman bertahun-tahun merasa lebih memahami kondisi riil dibandingkan pendekatan akademis penyuluh. Di sisi lain, tingkat pemahaman petani Kasemen terhadap penggunaan varietas unggul baru seperti Inpari 32 sudah cukup tinggi, bahkan sebagian petani telah mampu secara mandiri mengevaluasi kualitas benih sebelum digunakan tanpa menunggu bantuan pemerintah.

Kapasitas teknis dan teknologi dalam program intensifikasi pertanian di Kecamatan Kasemen secara umum telah didukung oleh ketersediaan infrastruktur irigasi primer yang relatif memadai, meskipun masih terdapat kendala berupa kebocoran saluran sekunder dan berkurangnya debit air dari hulu yang menyebabkan lahan di bagian ujung tidak mendapat pasokan air yang cukup. Pemerintah telah menyediakan program pompanisasi, pipanisasi, dan Jaringan Irigasi Tersier untuk mengatasi keterbatasan tersebut, namun sekitar 522 hektare sawah tadah hujan tetap bergantung pada curah hujan yang tidak dapat diandalkan sepanjang tahun. Pada aspek penanganan hama, kapasitas

teknis di Kecamatan Kasemen menghadapi tantangan serius berupa peningkatan serangan Penggerek Batang Padi dan Wereng Batang Cokelat yang terus meningkat dari tahun 2023 hingga 2025, di mana respons pengendalian yang tersedia belum sepadan dengan luas serangan yang terjadi. Petani di Kasemen lebih mengandalkan inisiatif dan pembiayaan mandiri dalam menghadapi serangan hama secara cepat, mengingat mekanisme pengendalian dari pemerintah dinilai terlalu lamban dan tidak responsif terhadap kedaruratan di lapangan.

Kapasitas politik dalam implementasi program intensifikasi pertanian di Kecamatan Kasemen mencerminkan upaya pemerintah untuk membangun dukungan masyarakat melalui pendekatan insentif berupa kemudahan akses benih dan pupuk bersubsidi, serta melalui pelibatan tokoh petani sebagai agen perubahan dalam menyebarkan adopsi teknologi baru kepada petani lainnya. Kerja sama lintas instansi dalam program ini melibatkan koordinasi antara Kementan, BRMP, Dinas Provinsi, Dinas Kota, POPT, BPTPH, BWS, dan PU yang secara umum berjalan cukup baik meskipun masih terdapat tantangan koordinasi pasca-perubahan status penyuluh menjadi pegawai pusat sejak Januari 2026. Ahmadi & Rahaju (2018) dalam penelitiannya juga menegaskan bahwa kurangnya koordinasi antara UPT Dinas Pertanian Kecamatan Kembangbahu dengan GAPOKTAN Mukti Jaya menjadi hambatan utama, di mana GAPOKTAN yang seharusnya berfungsi sebagai wadah penuh program intensifikasi pada praktiknya hanya berperan sebagai penyalur bantuan pupuk dan benih bersubsidi semata. Kepercayaan petani terhadap program pemerintah di Kecamatan Kasemen sangat ditentukan oleh konsistensi antara janji dan bukti nyata di lapangan, sehingga pendekatan percontohan melalui DEMFARM tetap menjadi cara paling efektif dalam membangun dan

mempertahankan dukungan petani. Secara keseluruhan, kapasitas dalam program intensifikasi pertanian di Kecamatan Kasemen menunjukkan bahwa meskipun struktur administratif, sumber daya manusia, infrastruktur teknis, dan jaringan koordinasi telah tersedia, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara kapasitas yang dimiliki dengan kebutuhan riil petani di lapangan, sehingga diperlukan penguatan yang lebih sistematis dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang

Aspek *Clients & Coalitions*

Petani padi di Kecamatan Kasemen didominasi oleh petani penggarap yang mengolah lahan milik pihak lain, bukan petani pemilik lahan. Kondisi ini secara struktural membatasi kapasitas ekonomi mereka, sebab hasil panen harus dibagi dengan pemilik lahan, sementara akses terhadap permodalan sendiri sangat terbatas. Mayoritas petani masih sangat bergantung pada pemodal eksternal dalam membiayai proses produksi. Meskipun skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui BRI tersedia, banyak petani yang tidak lolos verifikasi akibat rekam jejak kredit yang bermasalah, di antaranya disebabkan oleh penggunaan pinjaman *online* (pinjol) dan layanan keuangan digital yang tidak terkelola dengan baik.

Penerima manfaat program adalah kelompok tani yang telah terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN) dan memiliki lahan garapan yang dapat diverifikasi. Distribusi bantuan benih dilakukan melalui mekanisme CPCL (Calon Petani Calon Lokasi) yang diusulkan oleh penyuluh lapangan, kemudian disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas dan didistribusikan kepada ketua kelompok tani untuk diteruskan secara merata kepada seluruh anggota. Meskipun demikian, bapak Amir selaku Ketua Kelompok Tani Harjamukti 1

menyatakan bahwa alokasi bantuan benih sebesar 3 ton untuk satu kelompok dengan anggota mencapai 91 orang dinilai masih kurang, dengan kebutuhan ideal yang seharusnya mencapai 3,5 ton. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Sumberjaya melaporkan bahwa bantuan sebesar 900 kilogram untuk lahan seluas 60 hektare secara kalkulatif tidak mencapai batas kecukupan, meskipun tetap dimanfaatkan secara optimal melalui pengelolaan internal kelompok.

Respons penerima manfaat terhadap program penggunaan bibit unggul secara umum bersifat positif, meskipun terdapat sejumlah catatan kritis yang signifikan. Petani di Kecamatan Kasemen dinilai telah memiliki tingkat pemahaman yang memadai terkait teknik penggunaan dan pemilihan varietas unggul, bahkan sebagian besar petani mampu secara mandiri mengevaluasi kualitas benih sebelum digunakan. Rina Budiyantri menyatakan bahwa petani Kasemen pada umumnya telah secara sadar beralih menggunakan Varietas Unggul Baru (VUB), khususnya Inpari 32, dan tidak segan membeli benih berlabel secara mandiri ketika bantuan pemerintah tidak tersedia. Meskipun pemerintah berupaya memperkenalkan berbagai varietas padi unggul kepada petani, tingkat penerimaannya tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Penolakan terhadap varietas padi nutrising yang diperuntukkan untuk program penanganan stunting menjadi contoh konkret bahwa petani memiliki pertimbangan pasar yang rasional. Penolakan terhadap varietas padi nutrising yang diperuntukkan untuk program penanganan stunting menjadi contoh konkret bahwa petani memiliki pertimbangan pasar yang rasional, varietas tersebut ditolak karena ukuran bulir yang kecil dan cita rasa yang tidak sesuai dengan preferensi konsumen lokal Kota Serang.

Kendala yang dihadapi oleh penerima manfaat adalah ketidaktepatan waktu penyaluran bantuan benih.

Penyaluran bantuan benih seringkali terlambat, tidak sinkron dengan jadwal pengolahan lahan dan penanaman. Ketua Kelompok Tani Harjamukti 1 menyatakan adanya tumpang tindih penawaran program antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota pada musim tanam yang sama, yang memaksa kelompok tani hanya dapat menerima salah satu di antaranya. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara substantif petani telah merasakan manfaat dari penggunaan bibit unggul, tetapi masih terdapat kesenjangan antara rencana program dengan realitas implementasi, khususnya dalam aspek ketepatan sasaran, kecukupan volume bantuan, dan ketepatan waktu distribusi.

Implementasi kebijakan intensifikasi pertanian di Kecamatan Kasemen melibatkan berbagai aktor dari tingkat pusat hingga daerah. Pada tingkat nasional, Kementerian Pertanian berperan sebagai sumber kebijakan dan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah didukung oleh BRMP serta Dinas Pertanian Provinsi Banten sebagai unit pelaksana di daerah. Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Serang berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan program pemerintah dengan kelompok tani sebagai penerima manfaat. Pada tingkat kecamatan, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kasemen bertugas memberikan pendampingan teknis secara langsung kepada petani. Sejak Januari 2026, seluruh penyuluh pertanian telah resmi beralih status menjadi pegawai pusat di bawah Kementerian Pertanian sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2024. Perubahan tersebut menyebabkan pola koordinasi penyuluh menjadi lebih terpusat melalui BRMP, meskipun koordinasi dengan DKP3 Kota Serang tetap dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kebutuhan pelaporan di tingkat daerah.

Badan Wilayah Sungai (BWS) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dilibatkan dalam penanganan persoalan irigasi, baik pada level saluran primer dan sekunder yang menjadi kewenangan pusat maupun saluran tersier yang ditangani oleh Dinas Kota. Dalam penanganan serangan hama dan penyakit tanaman, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi bekerja sama dengan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) melalui mekanisme pelaporan yang dimulai dari tingkat lapangan hingga tingkat provinsi. Hasil pelaporan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui kegiatan Gerakan Pengendalian (GERDEL) yang melibatkan petani secara kolektif.

Salah satu mitra yang memiliki peran penting adalah Bank Indonesia melalui program klaster pertanian yang dijalankan bersama Kelompok Tani Sumberjaya. Menurut ketua kelompok tani tersebut, dukungan yang diberikan Bank Indonesia mencakup penyediaan sarana produksi, pendampingan manajemen usaha tani, serta pengembangan kapasitas kelompok secara berkelanjutan. Bentuk kerja sama tersebut bahkan berkembang hingga program penangkaran benih seluas 5 hektare yang dilaksanakan bersama BRMP Ciruas. Selain itu, sektor swasta turut berpartisipasi melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam bentuk bantuan pestisida maupun dukungan permodalan. Dari kalangan akademisi, beberapa lembaga penelitian juga terlibat melalui kegiatan riset yang dilakukan pada lahan pertanian di Kecamatan Kasemen untuk menghasilkan rekomendasi teknologi budidaya maupun varietas yang sesuai dengan kondisi setempat.

Pada penerapan program Intensifikasi Pertanian di Kecamatan Kasemen, Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan juga berkolaborasi dengan pihak eksternal, baik itu swasta, akademisi, maupun

lembaga riset. Kegiatan yang dilakukan oleh akademisi maupun lembaga riset yaitu dengan kegiatan penelitian di lahan pertanian di Kecamatan Kasemen. Kemudian untuk swasta sendiri memberikan program *Corporate Sustainability Responsibility (CSR)* dengan kegiatan pemberian pestisida serta bantuan permodalan. Adapun pemerintah Kota Serang berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Banten dalam kegiatan panen bawang merah dengan melalui metode *Demonstration Plot (Demplot)* tepatnya di Kelurahan Sawah Luhur kepada Kelompok Tani Sumber Jaya.

Gambar 2. *Demonstration Plot* bersama Bank Indonesia Provinsi Banten



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Bank Indonesia melalui program klaster pertanian memberikan dukungan berupa sarana produksi, pendampingan usaha tani, serta pengembangan penangkaran benih bersama BRMP. Sementara itu, sektor swasta berkontribusi melalui program CSR berupa bantuan pestisida dan dukungan permodalan, sedangkan akademisi dan lembaga penelitian berperan dalam penyediaan rekomendasi teknologi budidaya yang sesuai dengan kondisi lokal. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan adanya penguatan kapasitas implementasi melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama yang telah terbangun belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan utama yang dihadapi petani, terutama keterlambatan distribusi benih, keterbatasan bantuan permodalan, dan masih minimnya

keterlibatan pemerintah desa serta kecamatan dalam aspek teknis program.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Intensifikasi Pertanian melalui pemilihan dan penggunaan bibit unggul di Kecamatan Kasemen Kota Serang telah dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah. Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian. Penggunaan bibit unggul dinilai mampu membantu petani memperoleh hasil panen yang lebih baik dibandingkan penggunaan benih biasa. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan melalui penyuluhan, pendampingan, dan penyediaan sarana pertanian. Implementasi Program Intensifikasi Pertanian melalui pemilihan dan penggunaan bibit unggul di Kecamatan Kasemen mampu meningkatkan produksi maupun produktivitas pertanian, sehingga ketersediaan pangan atas peningkatan tersebut akan selalu terpenuhi dan tercukupi.

REFERENSI

- Ahmadi, F. F., & Rahaju, T. (2018). *Implementasi Program Intensifikasi Pertanian Sub Sektor Padi Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan* 6(6), 1–8.
- Akbar, K., Indra, & Rahmaddiansyah. (2023). Dampak Penggunaan Benih Unggul Inpari-32 Bersertifikat Terhadap Produktivitas dan Pendapatan Petani Padi di Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 8(165–79).
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029*.
- Damayanti, T. W., Sazuli, Isma, S., Mardila, S. A., & Reflis. (2025). Strategi Terpadu Peningkatan Produksi Padi di Indonesia : Suatu Analisis Literatur Komprehensif. *Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman*, 2(3), 01–12.
- Huanza, M., Adriani, D., & Damayanthi, D. (2022). Identifikasi Dampak Sosial Ekonomi Pada Berbagai Program Terkait Intensifikasi Pertanian Padi Di Lahan Pasang Surut Sumatera Selatan. *Jurnal KaliAgri*, 3(2), 70–79.
- Kardiyono, Mulyaqin, T., Susilawati, P. N., Haryani, D., Setyowati, I., & H., I. (2021). *A Model for Accelerating Rice Planting in Paddy Fields to Provide Food in Banten Province during the Covid-19 Pandemic*.
- KASAI. (2025, May). Mengulik Kebijakan Pangan Pemerintah Indonesia di Tahun 2025. *Kasai-Indonesia.Org*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: a methods sourcebook* (third). Arizona State University.
- Murtiningsih, T. (2021). Faktor Penentu dan Keberlanjutan Indeks Pertanaman Padi Pada IP 200 Dan IP 300 Di Daerah Irigasi Belitang Kabupaten Oku Timur. *Jurnal Bakti Agribisnis*, 7(2), 10–24.
- Rusdin, S., Syahrudin, & Teturan, Y. E. (2025). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Merauke. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(3).
- Salsabilla, K. A. K. P., Suhirmanti, Rahmi, A., & Masri. (2023). Implementasi Kebijakan Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 453–462.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Sukardi, S. I. S., Tauran, Rahaju, T., & Purbawati, I. (2026). Implementasi

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian di Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), 327–347.